Al Iidara Balad
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM PERBANKAN (CMSP) DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA DI KANTOR DESA BANGKILING KEC. BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG

Nor Azmi [1], Ramona Handayani [2], Nida Urahmah [3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
e-mail: lattecaffe43@gmail.com

ABSTRAK

Studi deskriptif kualitatif ini mengevaluasi efektivitas Cash Management System Perbankan (CMSP) dalam mendukung transparansi serta akurasi tata kelola keuangan di Kantor Desa Bangkiling, yang kerap didera kendala teknis, data asinkron, dan koneksi internet buruk. Lewat pendekatan observasi dan wawancara bersama 14 informan, riset mengindikasikan bahwa implementasi sistem tersebut belum optimal menurut parameter teori Duncan. Hambatan fundamental ditemukan pada lambatnya durasi penyelesaian transaksi, minimnya edukasi pengguna, serta keterbatasan kompetensi operator dalam beradaptasi dengan pembaruan fitur digital yang dinamis. Meski sistem ini mampu mengarahkan manajemen finansial menjadi lebih terstruktur, fluktuasi sinyal internet tetap menjadi batu sandungan utama di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah desa didesak untuk mengintensifkan bimbingan teknis secara berkala, mempererat kemitraan dengan otoritas perbankan, sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan lokal. Efektivitas CMSP, Tata Kelola Keuangan, Kendala Transaksi.

Kata Kunci: Efektivitas CMSP, Tata Kelola Keuangan, Kendala Transaksi.

ABSTRACT

This qualitative descriptive study evaluates the effectiveness of the Banking Cash Management System (CMSP) in supporting transparency and accurate financial governance at the Bangkiling Village Office, which frequently faces technical challenges, asynchronous data, and poor internet connections. Through observation and interviews with 14 informants, the research indicates that the system's implementation is suboptimal according to Duncan's theoretical parameters. Fundamental obstacles include slow transaction completion times, minimal user education, and limited operator competency in adapting to dynamic digital feature updates. Although the system is capable of guiding more structured financial management, internet signal fluctuations remain a major stumbling block in the field. Therefore, the village government is urged to intensify regular technical guidance, strengthen partnerships with banking authorities, and improve the quality of local network infrastructure. CMSP Effectiveness, Financial Governance, Transaction Constraints.

Keywords: *CMSP Effectiveness, Financial Governance, Transaction Constraints.*

PENDAHULUAN

Sistem tata kelola keuangan sektor publik di Indonesia tengah mengalami reposisi besar demi mengatasi kendala inefisiensi likuiditas, karut-marut arus kas, serta kebocoran anggaran pada tingkat satuan kerja. Jauh sebelum era digitalisasi ini digaungkan, operasional finansial pemerintahan masih sangat bertumpu pada prosedur konvensional di mana petugas wajib mendatangi kantor perbanka

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

secara fisik, menempuh birokrasi manual yang lamban, serta menghadapi kerawanan kriminalitas maupun celah korupsi akibat penanganan uang tunai. Guna membenahi kelemahan struktural tersebut, Kementerian Keuangan menginisiasi akselerasi teknologi melalui Gerakan Nasional Transaksi Non-Tunai (GNTT) serta mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 terkait strategi preventif tindak pidana korupsi. Langkah taktis ini diperkuat lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 yang memandatkan penggunaan Cash Management System Perbankan (CMSP) sebagai instrumen transaksi daring secara langsung (real-time online). Transformasi digital ini secara berkelanjutan terus dipacu oleh Pemerintah Indonesia untuk menciptakan sebuah ekosistem pengelolaan dana negara yang berlandaskan asas efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas yang tinggi. Kehadiran CMSP diposisikan sebagai langkah strategis dalam memodernisasi platform perbankan elektronik yang terpadu di internal birokrasi. Melalui sistem berbasis perbankan ini, satuan kerja kini memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi saldo aktual, mengeksekusi transfer dana antar-rekening, menyetor penerimaan negara, serta mengelola pos belanja APBN maupun APBD secara langsung.

Penggunaan SISKEUDES dan Cash Management System Perbankan memiliki keterkaitan dalam mendukung pengelolaan keuangan desa. SISKEUDES lebih berperan dalam aspek administrasi, penatausahaan, dan pelaporan keuangan, sedangkan CMSP mendukung aspek pelaksanaan transaksi dan pembayaran melalui sistem perbankan. Mekanisme tersebut dapat digambarkan bahwa proses pengelolaan keuangan yang dilakukan melalui SISKEUDES menghasilkan dokumen atau perintah pembayaran yang selanjutnya menjadi dasar dalam pelaksanaan transaksi melalui Cash Management System Perbankan. Melalui keterhubungan kedua sistem tersebut, pengelolaan keuangan desa diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penerapan Cash Management System Perbankan didorong oleh kebutuhan mengoptimalkan kelancaran kas pemerintah, mengurangi ketergantungan uang tunai, serta meminimalkan waktu dan biaya pembayaran. Kas pemerintah sering mengalami ketidakseimbangan antara pencairan dana dan pembayaran, yang menyebabkan pinjaman jangka pendek. Cash Management System Perbankan menawarkan solusi pengelolaan arus kas terpusat dan real-time, sehingga mengurangi pemborosan serta meningkatkan efisiensi anggaran. Kebijakan ini sejalan dengan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) serta upaya pencegahan korupsi, pencucian uang, dan pembiayaan terorisme melalui pencatatan transaksi digital yang terdokumentasi dan auditable.

Dalam mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah, Cash Management System Perbankan (CMSP) menyediakan berbagai menu dan fitur yang dirancang untuk mempermudah pelaksanaan transaksi keuangan secara elektronik, cepat, dan aman. Melalui sistem ini, perangkat desa tidak hanya dapat melakukan transaksi pembayaran secara non-tunai, tetapi juga memperoleh informasi keuangan secara real-time sehingga proses penatausahaan keuangan menjadi lebih efektif dan akuntabel.

Menu-menu yang tersedia pada Cash Management System Perbankan umumnya meliputi informasi saldo rekening, mutasi rekening, transfer dana antar rekening maupun antar bank, pembayaran pajak, pembayaran tagihan, persetujuan transaksi (approval), riwayat transaksi, serta pengelolaan pengguna (user management). Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan seperti pembagian hak akses berdasarkan peran pengguna (maker, checker, dan approver), Pencatatan seluruh aktivitas. Adanya pembagian peran tersebut bertujuan untuk meminimalkan kesalahan maupun penyalahgunaan dalam proses transaksi keuangan. Jika ditinjau dari aspek historis, tata cara pencairan serta pembayaran dana yang bersumber dari APBN maupun APBD pada satuan kerja pemerintah dulunya didominasi oleh sistem tunai tradisional. Pola lama ini terbukti kerap memicu keterlambatan distribusi dana, rentan terhadap kekeliruan administratif, dan membuka ruang bagi penyelewengan wewenang. Merespons perkembangan teknologi informasi yang masif serta komitmen kuat untuk memperkokoh integritas finansial nasional, Kementerian Keuangan merancang CMSP sebagai substitusi total bagi transaksi konvensional tersebut dengan mewajibkannya pada seluruh rekening bendahara pengeluaran. Kebutuhan mendesak untuk memperlancar perputaran kas negara, meminimalkan penggunaan uang fisik, serta menekan biaya operasional menjadi stimulus utama di balik kebijakan ini. Dinamika kas pemerintah yang kerap mengalami ketidakseimbangan antara waktu penarikan dana dan realisasi belanja sebelumnya sering

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

memicu munculnya pinjaman jangka pendek. Sebagai jalan keluar, CMSP menawarkan manajemen arus kas yang tersentralisasi dan seketika (real-time), yang terbukti ampuh mereduksi pemborosan sekaligus mendongkrak efisiensi alokasi anggaran. Kebijakan modernisasi transaksi ini berjalan selaras dengan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) serta berkontribusi nyata dalam memitigasi risiko korupsi, praktik pencucian uang, hingga pendanaan terorisme melalui sistem pencatatan digital yang transparan dan dapat diaudit. Secara yuridis, landasan penerapan skema nontunai ini juga telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 283 ayat
(2) mengenai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa tata kelola finansial daerah wajib diselenggarakan secara tertib, patuh hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, serta menjunjung asas keadilan dan kemanfaatan bagi publik.

Target fundamental dari implementasi CMSP adalah mengoptimalkan tata kelola kas negara, menjamin ketersediaan dana publik sesuai dengan linimasa belanja, serta mempermudah fungsi kontrol terhadap sirkulasi keuangan nasional. Inovasi teknologi ini mengintegrasikan seluruh rantai arus kas, mulai dari tahapan perencanaan, eksekusi anggaran, hingga proses pelaporan, sehingga berfungsi sebagai instrumen krusial dalam perumusan kebijakan fiskal berbasis data makro. Dampak positif dari kegunaan CMSP ini dirasakan langsung oleh bendahara pengeluaran yang kini mampu menyalurkan upah, honorarium, serta dana kontraktual tanpa perlu menguras waktu untuk datang ke bank, menjadikan proses kerja jauh lebih cepat, aman, dan produktif. Di sisi lain, unit pengelola keuangan disajikan data saldo dan aktivitas rekening secara seketika untuk memantau posisi likuiditas sekaligus mengantisipasi potensi defisit anggaran. Secara makro, keunggulan sistem ini meliputi penguatan efisiensi anggaran kementerian/lembaga, pemangkasan birokrasi pembayaran, minimalisasi faktor kesalahan manusia (human error), serta peningkatan akurasi laporan keuangan. CMSP juga secara inheren memperketat pengawasan fiskal lantaran setiap rekam jejak transaksi dapat dilacak dan diperiksa, sehingga mempersempit ruang gerak penyelewengan dana publik. Adapun spektrum pengguna platform ini mencakup bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan unit pengelola keuangan di lingkup pusat maupun daerah. Pada level pusat, instansi seperti Kementerian Keuangan melalui DJPK dan DJPb beserta bank yang ditunjuk memanfaatkan CMSP sebagai instrumen monitoring arus dana dan integrasi data finansial negara.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Kendati platform digital ini menyuguhkan lompatan besar dalam reformasi birokrasi, penyerapan CMSP di lapangan nyatanya masih dibayangi berbagai hambatan riil seperti kesenjangan kapasitas kompetensi sumber daya manusia, ketergantungan pada infrastruktur teknologi, serta disparitas tingkat adopsi antar-satuan kerja. Urgensi untuk menganalisis dinamika implementasi ini memicu perlunya kajian mendalam mengenai peran serta strategi optimalisasi CMSP demi mendukung tata kelola keuangan negara yang ideal. Fakta menunjukkan bahwa meskipun sistem ini dirancang untuk memacu pencairan dana, menekan risiko kehilangan uang tunai, dan mencegah manipulasi data , penerapannya di level pemerintahan desa kerap membentur realitas yang kompleks. Sebagai contoh nyata, Kantor Desa Bangkiling yang terletak di Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, menghadapi tantangan operasional yang cukup pelik dalam mengadopsi teknologi ini. Meskipun CMSP diproyeksikan untuk mengeskalasi efektivitas penatausahaan, intervensi kendala teknis yang kerap muncul justru mendisrupsi aktivitas kerja di desa tersebut. Fenomena empiris yang ditemukan di Kantor Desa Bangkiling mencakup beberapa problem utama, di antaranya adalah sering terjadinya malafungsi atau gangguan teknis pada aplikasi CMSP yang menghambat ritme kerja dan memicu keterlambatan penyelesaian tugas operasional. Selain itu, acapkali dijumpai ketidaksinkronan data transaksi, seperti status yang tertera sukses pada sistem namun dana belum kunjung masuk ke rekening penerima, terutama pada kasus transfer antarbank yang berbeda. Hambatan ini diperparah oleh minimnya agenda bimbingan teknis (Bimtek) bagi para operator desa yang berujung pada tidak optimalnya pemahaman penggunaan aplikasi , serta kondisi koneksi internet lokal yang tidak stabil sehingga menghambat kelancaran akses ke platform digital tersebut. Berangkat dari realitas tersebut, evaluasi mengenai tingkat efektivitas penggunaan CMSP dalam penatausahaan keuangan di Kantor Desa Bangkiling menjadi sangat krusial guna merumuskan solusi atas hambatan transaksi agar tata kelola finansial desa berjalan optimal sesuai regulasi.

Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan sistem ini di tingkat desa, orientasi analisis bersandar pada tinjauan teoritis mengenai konsep efektivitas. Secara etimologis, istilah efektif berakar dari bahasa Inggris effective yang mengandung makna berhasil atau tercapainya suatu tindakan dengan hasil yang baik. Kamus ilmiah populer menjabarkan efektivitas sebagai ketepatan dalam penggunaan, kegunaan hasil, atau instrumen penunjang tujuan , sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikannya sebagai pengaruh, efek, akibat, atau kemampuan dalam membawa hasil nyata. Dalam perspektif umum, efektivitas merepresentasikan keaktifan, daya guna, serta keselarasan antara aktivitas individual yang mengemban tugas dengan sasaran akhir yang dibidik. Kondisi ini merefleksikan parameter sejauh mana suatu perencanaan mampu direalisasikan; semakin banyak rencana yang berwujud, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Menurut Mahmudi dan Handoko, efektivitas dititikberatkan pada relasi fungsional antara output yang dihasilkan dengan tujuan akhir yang dicanangkan, di mana kontribusi besar dari output terhadap capaian sasaran menandakan tingginya efektivitas organisasi atau program tersebut. Fokus utama efektivitas terletak pada aspek outcome (hasil), di mana program dinilai berhasil apabila keluarannya selaras dengan ekspektasi awal. Senada dengan hal itu, Ravianto menekankan bahwa efektivitas mengukur mutu pelaksanaan kerja dan kesesuaian keluaran dengan perencanaan awal, baik dari segi dimensi waktu, efisiensi biaya, hingga kualitasnya. Pendapat P. Siagian serta Simamora turut mengonfirmasi bahwa esensi efektivitas adalah keberhasilan dalam menggapai sasaran yang telah ditetapkan, di mana kedekatan hasil nyata dengan target mencerminkan eskalasi nilai efektivitas itu sendiri. Konsep ini bahkan mencakup aspek yang lebih luas, melampaui produktivitas kerja hingga menyentuh dimensi persepsi atau sikap individu pelaksana di lapangan. Prasetyo merangkumnya sebagai tingkat kedekatan antara output riil dengan output ideal yang diharapkan dari pemanfaatan sejumlah input. Singkatnya, efektivitas berfungsi sebagai barometer esensial untuk mengomparasikan kesenjangan antara perencanaan awal, dinamika proses, dan pencapaian konkret yang diraih.

Dalam upaya membedah tingkat efektivitas suatu program, literatur manajemen menyediakan beberapa instrumen analisis, salah satunya melalui pendekatan efektivitas yang terbagi atas tiga rumpun metode. Pertama, pendekatan sasaran yang memfokuskan perhatian pada sejauh mana organisasi berhasil merealisasikan target output yang direncanakan dengan mempertimbangkan orientasi waktu yang presisi. Kedua, pendekatan sumber yang menakar efektivitas berdasarkan

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

kapasitas lembaga dalam memperoleh, mengamankan, serta mengelola berbagai sumber daya langka dan bernilai tinggi dari lingkungan eksternal demi menyokong pencapaian tujuan. Ketiga, pendekatan proses yang menitikberatkan indikatornya pada efisiensi, keharmonisan, serta kesehatan internal organisasi, di mana seluruh bagian fungsional berjalan secara terkoordinasi dan lancar. Merujuk pada pemikiran Duncan yang dikutip oleh Richard M. Steers, terdapat tiga dimensi utama sebagai alat ukur efektivitas, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dimensi pencapaian tujuan dipandang sebagai proses bertahap dan periodik untuk mengamankan target konkret dalam kurun waktu tertentu. Sementara itu, integrasi mengukur kapasitas organisasi dalam menyelenggarakan sosialisasi, membangun konsensus, serta menjalin komunikasi antar-lembaga. Adapun adaptasi menitikberatkan pada keluwesan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan sekitar melalui mekanisme pengadaan tenaga kerja yang andal. Untuk melengkapi dimensi tersebut, Siagian mengemukakan sejumlah indikator pendukung efektivitas sasaran, meliputi kejelasan target organisasi, ketepatan strategi pencapaian agar implementer tidak tersesat, kemantapan analisis kebijakan operasional, kematangan perencanaan masa depan, ketepatan formulasi program kerja, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang produktivitas, pelaksanaan kegiatan yang efektif-efisien, serta eksistensi sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik bagi para aparatur.

Keberhasilan pencapaian efektivitas di ranah organisasi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh interaksi multidimensional dari berbagai faktor strategis sebagaimana dikemukakan oleh Richard M. Steers. Faktor-faktor tersebut meliputi karakteristik organisasi yang mengulas keterkaitan antara struktur hubungan sumber daya manusia dengan adopsi teknologi sebagai mekanisme pengubah masukan mentah menjadi keluaran. Selain itu, karakteristik lingkungan, yang mencakup aspek eksternal di luar batas organisasi maupun iklim internal di dalam lingkungan kerja, turut memegang kendali atas corak keputusan dan tindakan aparatur. Kontribusi nyata dari karakteristik pekerja, yang tecermin lewat pola interaksi sosial, rasa keterikatan terhadap institusi, serta prestasi kerja individual, juga menjadi penentu langsung performa organisasi. Terakhir, karakteristik manajemen yang merepresentasikan gaya kepemimpinan, perumusan tujuan strategis, pemanfaatan sumber daya, kelancaran proses komunikasi, serta ketepatan pengambilan keputusan, menjadi pilar penggerak roda efektivitas. Dalam konteks operasional transaksi digital di desa, faktor-faktor ini bermanifestasi langsung dalam mekanisme kerja CMSP yang dirancang tidak bersandar pada dominasi satu individu demi mengawal transparansi keuangan. Mekanisme pembagian otoritas ini diatur secara berjenjang melalui tiga peran utama. Pertama, figur Maker yang diemban oleh operator atau bendahara desa bertugas melakukan penginputan data transaksi awal ke dalam aplikasi. Kedua, peran Checker yang dilaksanakan oleh Sekretaris Desa bertindak sebagai verifikator untuk memeriksa validitas data serta kesesuaian pagu anggaran. Ketiga, fungsi Approver yang dipegang penuh oleh Kepala Desa selaku pemegang otoritas tertinggi untuk memberikan persetujuan akhir sehingga dana dapat ditransfer secara elektronik. Sistem berlapis ini kian solid berkat adanya integrasi Siskeudes Link yang mentransfer data belanja dari aplikasi Siskeudes ke sistem perbankan secara otomatis (host-to-host) demi mengeliminasi risiko galat akibat input manual.

Seluruh implementasi transaksi non-tunai berbasis teknologi ini pada hakikatnya bermuara pada penguatan siklus pengelolaan keuangan desa yang secara yuridis diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Regulasi tersebut menegaskan bahwa tata kelola finansial desa merupakan satu kesatuan rantai terintegrasi yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Proses ini mensyaratkan keterlibatan partisipatif dari elemen eksternal dan unsur masyarakat, serta menuntut akuntabilitas horizontal dengan BPD maupun vertikal dengan warga desa. Pada fase perencanaan, desa wajib menyusun RPJMDesa yang memuat visi misi kepala desa dalam jangka waktu tiga bulan pasca-pelantikan, serta menjabarkannya ke dalam RKPDesa tahunan sebagai fondasi penyusunan APBDesa. Berlanjut ke tahap pelaksanaan dan penatausahaan, seluruh sirkulasi dana wajib melalui Rekening Kas Desa dengan pencairan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Bendahara desa memegang mandat penuh untuk menyelenggarakan pencatatan transaksi secara sistematis dan kronologis menggunakan metode pembukuan sederhana tanpa jurnal akuntansi. Instrumen administrasi penatausahaan yang

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

wajib dikelola secara tertib oleh bendahara meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, serta Buku Bank. Pada fase akhir, kepala desa memikul kewajiban periodik untuk menyampaikan Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDesa serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota melalui Camat, serta kepada BPD dengan batas waktu maksimal satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir. Penyerahan dokumen pertanggungjawaban tahunan tersebut wajib dilampiri dengan format laporan realisasi, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember, serta format laporan program pemerintah yang masuk ke wilayah desa.

METODE

Proses pengumpulan data dalam kajian ilmiah ini dipusatkan di Jalan Bangkiling RT 05, Desa Bangkiling, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk membedah fenomena di lokasi tersebut, digunakan pendekatan kualitatif dengan format deskriptif guna memotret realitas di lapangan secara objektif, utuh, dan apa adanya. Pemilihan strategi ini sejalan dengan pandangan rumpun ilmu sosial yang menempatkan filsafat postpositivisme sebagai fondasi untuk memeriksa kondisi objek yang bersifat alamiah, di mana data yang dihimpun cenderung berupa narasi verbal bukan angka statistik. Melalui metode deskriptif kualitatif, analisis dijalankan secara induktif agar mampu mengangkat keunikan objek, makna di balik interaksi sosial, serta mengonstruksi fenomena nyata menjadi sebuah temuan konseptual yang berharga tanpa bermaksud menarik generalisasi yang terlampau luas.

Operasionalisasi studi deskriptif ini bergerak secara sistematis yang diawali dari perumusan masalah, pemetaan figur informan, hingga eksekusi penggalian data lewat pengamatan mendalam serta penarikan simpulan. Guna menjamin kedalaman informasi, data primer diperoleh secara langsung di area riset melalui dialog tatap muka dan pengamatan atas aktivitas aparatur desa. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan untuk memperkuat basis teoretis melalui telaah literatur keperpustakaan dan dokumen kelembagaan yang valid. Penentuan narasumber di lapangan menerapkan teknik cuplikan bertujuan (purposive sampling), di mana proses wawancara terus bergulir secara berantai dari informan pangkal menuju informan kunci, dan baru akan diakhiri saat data telah menyentuh titik jenuh atau tidak lagi memunculkan variasi informasi baru. Adapun rincian subjek yang menjadi narasumber utama dalam riset ini meliputi 15 personel, yang terdiri dari Kepala Desa Bangkiling (Itar), Sekretaris Desa (Nor Halimah, S.P), Bendahara Desa (Basuki Rahmat), Staf Bendahara (Yati Kamariah, S.Pd), Ketua BPD (Samlan), tujuh orang Ketua RT (dari RT 01 sampai RT 07), serta tiga perwakilan elemen masyarakat setempat (Arman, Asnawi, dan Latipah).

Arah penyelidikan ini dirancang secara terukur untuk membedah tingkat efektivitas penerapan Cash Management System (CMS) perbankan dalam tata kelola keuangan pemerintahan Desa Bangkiling. Mengacu pada kerangka pemikiran mengenai dimensi efektivitas organisasi, desain operasional dalam riset ini diturunkan ke dalam tiga poros sub-variabel utama. Pertama adalah variabel pencapaian tujuan yang diukur melalui indikator kurun waktu pengoperasian aplikasi, ketepatan waktu penyelesaian transaksi keuangan, serta profil sasaran pengguna sistem digital tersebut. Dimensi kedua bertumpu pada aspek integrasi, yang menyoroti instrumen sosialisasi penggunaan platform CMS serta pola komunikasi koordinatif antarlembaga yang terlibat dalam ekosistem keuangan desa. Poros ketiga adalah kemampuan adaptasi, yang memantau dinamika proses pengelolaan aplikasi, kendala dan kemudahan dalam pengoperasian harian, hingga kebijakan penataan atau pengisian kapasitas tenaga kerja yang ditugaskan sebagai operator sistem perbankan tersebut.

Riset kualitatif ini mengandalkan tiga instrumen utama dalam menghimpun fakta empiris di lapangan agar data yang diperoleh memenuhi standar ilmiah yang baku. Instrumen pertama adalah observasi atau pengamatan langsung terhadap perilaku, kebiasaan, dan aktivitas kerja harian subjek di kantor desa, yang dilakukan secara terencana untuk menangkap esensi dari setiap tindakan mereka. Langkah kedua ditopang oleh teknik wawancara (interview) semiterstruktur dan mendalam menggunakan panduan pertanyaan (interview guide) sebagai pemantik diskusi. Model dialog interaktif ini memberikan ruang yang fleksibel bagi peneliti untuk mengeksplorasi gagasan, persepsi,

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

dan sudut pandang informan secara terbuka namun tetap terarah pada substansi masalah. Instrumen pelengkap yang terakhir adalah dokumentasi, yaitu proses pengumpulan rekam jejak aktivitas berupa foto kegiatan, arsip laporan keuangan, maupun catatan penting lainnya yang berfungsi sebagai bukti autentik bahwa fenomena tersebut benar-benar terjadi masa kini.

Siklus pengolahan data dikerjakan secara simultan sejak peneliti berada di lapangan hingga seluruh berkas rampung dikumpulkan melalui tiga tahapan interaktif, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data berfokus pada aktivitas merangkum, memilah, dan mengklasifikasikan data mentah ke dalam tema-tema krusial sembari membuang informasi yang tidak relevan. Selanjutnya, data yang telah disaring tersebut disajikan dalam format teks naratif, matriks, atau bagan terstruktur guna mempermudah pembacaan pola hubungan sebelum ditarik sebuah kesimpulan akhir yang kredibel. Demi menjaga tingkat keabsahan dan akurasi temuan, peneliti menerapkan enam pilar uji kredibilitas data. Langkah tersebut meliputi perpanjangan waktu pengamatan guna membangun kedekatan emosional dengan subjek, peningkatan ketekunan lewat pengecekan data secara berkala, melakukan triangulasi (sumber, teknik, dan waktu), mengadakan ruang diskusi kritis bersama rekan sejawat, menganalisis temuan kasus-kasus negatif yang menyimpang, serta melakukan konfirmasi ulang (member check) kepada para informan demi memastikan bahwa narasi yang ditulis telah selaras dengan maksud asli yang disampaikan oleh pemberi data.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penggunaan Cash Management System Perbankan dalam penatausahaan keuangan desa di kantor desa Bangkiling Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong

1. Pencapaian Tujuan

a. Kurun waktu aplikasi

Durasi implementasi Cash Management System Perbankan (CMSP) di Kantor Desa Bangkiling menjadi indikator krusial untuk memetakan rekam jejak digitalisasi penatausahaan keuangan desa. Aspek waktu ini memberikan gambaran konkret mengenai titik awal pemanfaatan sistem, dinamika adaptasi para aparatur, serta konsistensi operasional platform dalam memproses transaksi harian. Melalui penelusuran linimasa ini, peneliti dapat mengukur tingkat kematangan sistem, apakah pemanfaatannya masih berada pada fase rintisan, tahap penyesuaian fungsional, atau justru telah melembaga menjadi bagian integral dari budaya kerja dan prosedur tetap di lingkungan pemerintahan desa.

Merujuk pada triangulasi data melalui wawancara mendalam, pengamatan lapangan, dan pemantauan dokumen, digitalisasi transaksi lewat CMSP di Desa Bangkiling resmi berjalan secara efektif sejak tahun 2024. Fakta empiris menunjukkan bahwa sistem perbankan digital ini telah menyatu dalam ritme kerja administrasi keuangan desa, yang diperkuat oleh bukti otentik berupa arsip transaksi, catatan agenda harian, dan berkas pelatihan intensif bagi para pegawai. Fenomena ini selaras dengan teori Richard M. Steers mengenai dimensi karakteristik manajemen yang memengaruhi efektivitas organisasi. Langkah strategis pemerintah desa sejak tahun 2024 yang diwujudkan lewat edukasi personel dan integrasi sistem eksternal menegaskan komitmen manajemen dalam mendorong efisiensi tata kelola melalui modernisasi teknologi.

b. Waktu Penyelesaian

Kecepatan penyelesaian transaksi finansial dan ketepatan waktu dalam mencapai target operasional merupakan barometer utama untuk mengukur efisiensi suatu sistem. Pada ranah tata kelola anggaran publik seperti kas pemerintahan desa, durasi pemrosesan dana menjadi indikator riil yang menentukan keberhasilan optimalisasi arus kas sekaligus

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

meminimalisasi risiko keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu, ketepatan waktu eksekusi tidak sekadar menjadi target teknis, melainkan pilar penting yang memengaruhi kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas performa birokrasi di tingkat desa.

Namun, berdasarkan hasil triangulasi data di Desa Bangkiling, aspek waktu penyelesaian melalui Cash Management System Perbankan (CMSP) dinilai masih kurang efektif. Meski para informan mengakui bahwa platform digital ini jauh lebih ringkas dan cepat daripada metode konvensional secara tunai, penerapannya kerap memicu keterlambatan akibat intermitensi atau ketidakstabilan jaringan internet di area lokal. Realitas lapangan ini sangat relevan dengan teori Richard M. Steers mengenai karakteristik lingkungan internal organisasi yang memengaruhi efektivitas. Kendati inovasi teknologi perbankan ini menawarkan efisiensi tinggi, performa aktualnya di Desa Bangkiling tetap tersandera oleh keterbatasan infrastruktur pendukung, sehingga kondisi lingkungan kerja dan keandalan jaringan internet lokal menjadi penentu mutlak dalam kelancaran penyaluran dana.

c. Sasaran Pengguna Aplikasi

Aspek sasaran pengguna teknologi ini tidak sekadar merujuk pada hak akses sistem, melainkan menyangkut delegasi wewenang resmi kepada aparatur desa yang memegang mandat teknis dan administratif. Personel yang ditunjuk bertanggung jawab penuh terhadap seluruh siklus digitalisasi anggaran, mulai dari proses input data, verifikasi berkas, hingga penyusunan laporan transaksi keuangan desa lewat platform digital. Distribusi peran yang legal dan terspesialisasi ini menjadi krusial demi menjamin keabsahan operasional serta mencegah terjadinya tumpang tindih otoritas dalam tata kelola keuangan publik.

Berdasarkan hasil investigasi lapangan, penerapan skema kerja ini telah berjalan secara efektif di Kantor Desa Bangkiling melalui pembagian trias peran perbankan digital yang ketat. Manajemen otorisasi didelegasikan secara terstruktur: Bendahara Desa bertindak sebagai pembuat transaksi (maker), Sekretaris Desa mengemban tugas sebagai pemeriksa (checker), dan Kepala Desa memegang kuasa penuh selaku penyetuju (approver). Formasi kerja ini sangat selaras dengan teori Richard M. Steers mengenai karakteristik organisasi sebagai determinan efektivitas. Kejelasan struktur tugas dan pemisahan fungsi kontrol tersebut membuktikan adanya penataan sumber daya manusia yang solid, yang secara langsung memperkuat akuntabilitas dan transparansi penatausahaan keuangan desa melalui Cash Management System Perbankan (CMSP).

2. Integrasi

a. Sosialisai penggunaan aplikasi

Sosialisasi dan edukasi berkala yang diinisiasi oleh pemerintah daerah bersama Bank Kalsel merupakan pilar krusial untuk mengenalkan sekaligus menyelaraskan pemahaman aparatur desa terhadap sistem Cash Management System Perbankan (CMSP). Serangkaian agenda pendampingan ini dirancang khusus guna mentransfer informasi mengenai fungsi teknis, nilai kemanfaatan, dan tata cara pengoperasian platform digital tersebut. Target utamanya adalah menjamin seluruh perangkat desa tidak hanya sekadar mengetahui eksistensi teknologi baru ini, melainkan juga cakap mengeksekusi setiap menu sesuai prosedur formal guna diadopsi ke dalam ritme kerja administrasi harian.

Namun, potret empiris dari hasil triangulasi data di Desa Bangkiling mengindikasikan bahwa pelaksanaan pelatihan teknis ini dirasa kurang efektif. Hambatan

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

utama muncul dari dinamisnya pembaruan fitur-fitur aplikasi yang kerap berubah, sehingga materi pelatihan yang telah diberikan cepat usang dan memaksa para aparatur untuk belajar mandiri dengan saling melempar diskusi antarsejawat. Realitas ini beririsan langsung dengan teori Richard M. Steers mengenai karakteristik manajemen sebagai determinan efektivitas integrasi. Meski manajemen pusat telah berupaya menyusun strategi bimbingan teknis (Bimtek) dan komunikasi interaktif, akselerasi adaptasi di lapangan masih tersendat oleh pembaruan sistem yang masif dan gangguan server berkala, yang menegaskan perlunya pola pendampingan yang berkelanjutan dan adaptif.

b. Komunikasi antar organisasi

Komunikasi antarorganisasi yang melibatkan pertukaran informasi, penyelarasan langkah, dan negosiasi merupakan instrumen vital dalam menciptakan sinkronisasi kerja demi mencapai tujuan bersama. Dalam tata kelola keuangan publik, pola interaksi antara Pemerintah Desa dan Bank Kalsel menjadi pilar penentu untuk menjaga stabilitas sirkulasi anggaran. Koordinasi yang intensif sangat dibutuhkan, terutama sebagai jembatan solusi ketika muncul hambatan teknis yang berkaitan dengan mekanisme penyaluran dana desa maupun kendala pada sistem pelaporan keuangan.

Berdasarkan hasil investigasi lapangan, jalinan komunikasi antarlembaga dalam pengoperasian CMSP di Desa Bangkiling dinilai berjalan cukup efektif berkat pemanfaatan grup WhatsApp bersama admin Bank Kalsel. Ruang diskusi virtual ini mempermudah para aparatur desa untuk melakukan konfirmasi dan penyelesaian kendala sistem secara instan tanpa harus membuang waktu dan biaya akomodasi untuk mendatangi kantor bank secara fisik. Realitas ini sangat selaras dengan teori Richard M. Steers mengenai karakteristik manajemen sebagai determinan efektivitas. Penerapan strategi komunikasi berbasis daring ini membuktikan adanya mekanisme kerja yang adaptif, di mana anomali sistem seperti keterlambatan pencairan atau ketidaksinkronan data dapat segera ditangani melalui pola koordinasi yang taktis dan terorganisir.

3. Adaptasi

a. Proses pengelolaan aplikasi

Tata kelola aplikasi keuangan mencakup rangkaian pengawasan sistematis untuk menjaga performa, fungsi, dan keamanan perangkat lunak sepanjang siklus operasionalnya. Dalam birokrasi pemerintahan, manajemen ini sangat krusial untuk menjamin bahwa adopsi teknologi mampu mengakomodasi kebutuhan administrasi sekaligus mengamankan data penting organisasi. Berdasarkan hasil investigasi lapangan di Desa Bangkiling, proses pengelolaan Cash Management System Perbankan (CMSP) dinilai cukup tertata dan aman, meskipun para aparatur masih harus terus membiasakan diri menghadapi dinamika sistem. Fleksibilitas aparatur dalam mengatasi kendala teknis melalui diskusi internal membuat penatausahaan keuangan desa tetap berjalan transparan, akuntabel, dan terarah.

Keberhasilan pengelolaan ini ditopang oleh mekanisme proteksi data dan alur verifikasi berlapis yang diterapkan secara ketat. Pengoperasian CMSP dijalankan melalui akun pribadi yang terpisah demi menjaga kerahasiaan hak akses, diperkuat dengan pembaruan kata sandi berkala serta otorisasi berjenjang dari bendahara, sekretaris desa, hingga persetujuan akhir kepala desa. Pola kerja ini sangat relevan dengan teori Richard M. Steers mengenai karakteristik manajemen sebagai pilar efektivitas organisasi. Penerapan regulasi internal yang disiplin dan terstruktur tersebut membuktikan komitmen

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

pemerintah desa dalam membangun ekosistem digital yang aman, tertib, dan bebas dari risiko manipulasi data keuangan.

b. Proses penggunaan aplikasi

Kemampuan adaptasi organisasi dalam merespons disrupsi teknologi diukur dari sejauh mana para aparatur mampu menyelaraskan diri dengan sistem digital seperti CMSP. Proses transformasi ini menuntut kesiapan perangkat desa untuk beralih dari pola konvensional menuju prosedur elektronik, mulai dari penguasaan fitur baru, mekanisme input data, hingga tata kelola transaksi harian. Berdasarkan hasil investigasi lapangan di Desa Bangkiling, proses penyesuaian ini secara umum telah berjalan dengan baik. Para aparatur desa terbukti mampu mengoperasikan dan memanfaatkan platform digital ini dalam aktivitas penatausahaan keuangan sehari-hari dengan tingkat resiliensi yang tinggi terhadap perubahan sistem.

Meskipun kendala eksternal seperti fluktuasi jaringan internet berkala masih membayangi, komitmen personel dalam mengoptimalkan infrastruktur pendukung mampu meminimalisasi hambatan tersebut. Realitas ini sangat selaras dengan teori Richard M. Steers mengenai karakteristik pekerja sebagai salah satu determinan utama efektivitas organisasi. Keterampilan yang ditunjukkan oleh bendahara, sekretaris desa, dan staf bendahara dalam menguasai CMSP pasca-pelatihan mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang adaptif. Kesiapan kerja, motivasi, dan kapasitas intelektual para perangkat desa dalam mengadopsi ekosistem digital inilah yang menjadi pilar utama keberhasilan desa dalam menghadapi modernisasi teknologi perbankan.

c. Pengisian tenaga kerja yang mengoperasikan CMS

Penempatan sumber daya manusia yang cakap untuk mengoperasikan Cash Management System Perbankan (CMSP) di Kantor Desa Bangkiling merupakan langkah strategis yang sangat krusial. Proses pengisian formasi ini memegang peranan penting agar birokrasi desa mampu menyelaraskan diri dengan regulasi digitalisasi sektor publik, sekaligus menjamin transparansi dan kelancaran tata kelola anggaran. Menariknya, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di lapangan tidak lagi bertumpu secara kaku pada latar belakang pendidikan formal linier, melainkan lebih menitikberatkan pada penempatan personel yang adaptif, memiliki etos kerja tinggi, serta fleksibel terhadap pembaruan sistem digital.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan mendalam, pengisian tenaga kerja ini dinilai cukup berhasil membentuk tim yang kompeten berkat akumulasi pengalaman lapangan, keikutsertaan dalam bimbingan teknis, dan tingginya kemauan belajar mandiri. Sebagai contoh, ketika menghadapi kendala intermitensi jaringan internet, Bendahara Desa (Basuki Rahmat) bersama jajaran aparatur bahu-membahu menyelesaikannya melalui pola kerja kolaboratif, sehingga mutu pelayanan keuangan kepada masyarakat tetap terjaga dengan baik. Fenomena ini sangat relevan dengan teori Richard M. Steers mengenai karakteristik pekerja sebagai determinan efektivitas. Kesiapan mental, kegigihan untuk belajar, serta daya adaptasi personel bentukan internal ini terbukti mampu menutupi keterbatasan akademis awal mereka dalam menguasai ekosistem digital CMSP.

B. Faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan Cash Management System Perbankan (CMSP) dalam penatausahaan keuangan desa di Kantor Desa Bangkiling Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong

1. Faktor Pendukung Efektivitas

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

a. Memudahkan penglolaan dan menjadi lebih terarah

Implementasi Cash Management System Perbankan (CMSP) di Kantor Desa Bangkiling yang diinisiasi sejak tahun 2024 kini telah bertransformasi menjadi pilar utama dalam digitalisasi transaksi finansial secara berkelanjutan. Keberhasilan transisi ini ditopang oleh serangkaian pembekalan teknis bagi para aparatur, yang secara signifikan mempercepat fase adaptasi dari metode manual menuju ekosistem digital. Konsistensi penggunaan platform ini dalam setiap proses pencairan anggaran dan administrasi harian membuktikan bahwa teknologi perbankan tersebut mampu beroperasi secara stabil, sehingga lambat laun melebarkan sayapnya menjadi bagian integral dari budaya kerja baru di lingkungan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil triangulasi data melalui wawancara, pengamatan langsung, dan verifikasi dokumen, penerapan CMSP di Desa Bangkiling terbukti berjalan efektif dalam mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah. Fenomena keberhasilan ini sangat relevan dengan teori Richard M. Steers mengenai karakteristik pekerja sebagai salah satu determinan utama efektivitas organisasi, yang menekankan pada aspek kompetensi, keahlian, dan daya resiliensi sumber daya manusia. Kesiapan mental dan keterampilan teknis yang ditunjukkan para aparatur dalam mengoperasikan aplikasi ini pasca-pelatihan mempertegas bahwa kualitas pengguna memegang peranan mutlak. Dampaknya, seluruh siklus penatausahaan anggaran kini menjadi jauh lebih sistematis, transparan, dan terarah dibandingkan pola konvensional sebelumnya.

b. Pengguna Aplikasi Cash Management System Perbankan (CMSP) Memahami Penggunaan Aplikasi ini

Spesialisasi tugas dan delegasi wewenang yang tegas terbukti menjadi pilar utama dalam mengoptimalkan pemanfaatan Cash Management System Perbankan (CMSP). Operasionalisasi platform digital ini dijalankan secara disiplin oleh jajaran aparatur desa melalui pembagian peran yang ketat, di mana Bendahara Desa memegang fungsi sebagai pembuat transaksi (maker), Sekretaris Desa bertindak selaku pemeriksa berkas (checker), dan Kepala Desa mengemban kuasa penuh sebagai penyetuju (approver). Struktur tata kerja berlapis ini tidak hanya membuat proses transaksi dan penatausahaan kas desa menjadi lebih sistematis, melainkan juga menciptakan sistem pengawasan internal yang kuat guna meminimalkan risiko kekeliruan administratif.

Berdasarkan hasil triangulasi data lapangan, pembagian tanggung jawab yang konsisten tersebut berjalan sangat efektif lantaran didukung oleh tingkat pemahaman yang matang dari setiap personel pengguna. Realitas ini sangat selaras dengan teori Richard M. Steers mengenai karakteristik pekerja sebagai salah satu determinan krusial dalam efektivitas organisasi. Dimensi ini menyoroti aspek kapasitas intelektual, keahlian teknis, serta komitmen aparatur dalam mengeksekusi tanggung jawabnya. Keberhasilan para perangkat Desa Bangkiling dalam menguasai alur kerja digital operasional CMSP menegaskan bahwa kesiapan dan kecakapan sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, aman, dan akuntabel.

2. Faktor Penghambat

a. Kendala Jaringan Internet Tidak Stabil

Faktor krusial yang mengganjal optimalisasi sejumlah indikator keberhasilan program ini adalah ketidakstabilan koneksi internet. Mengingat Cash Management

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

System Perbankan (CMSP) beroperasi sepenuhnya secara digital dan daring, kualitas jaringan menjadi urat nadi utama yang menentukan kelancaran sistem. Berdasarkan temuan di lapangan melalui wawancara dan pengamatan langsung, gangguan sinyal ini memicu efek domino berupa keterlambatan massal, mulai dari proses input transaksi, pengunggahan dokumen, verifikasi data, hingga tahap akhir pencairan dana. Akibat kendala teknis tersebut, performa dan efektivitas pemanfaatan aplikasi CMSP dalam mendukung aktivitas operasional menjadi terhambat dan belum mampu mencapai target yang diharapkan.

Kondisi riil di lapangan ini sejalan dengan teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Richard M. Steers, khususnya mengenai pengaruh karakteristik lingkungan. Teori tersebut menyatakan bahwa dinamika lingkungan internal maupun eksternal memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan suatu sistem. Dalam konteks analisis ini, ketidakstabilan jaringan internet beserta gangguan pada server pusat berperan sebagai hambatan lingkungan eksternal yang paling dominan. Kegagalan infrastruktur digital ini secara langsung mengacaukan ritme kerja terutama pada aspek kecepatan transaksi dan validasi data sehingga implementasi sistem tidak dapat berjalan secara simultan dan beberapa indikator efektivitas organisasi pun gagal terpenuhi dengan baik.

b. Perubahan Fitur Aplikasi yang Terus Berkembang

Tantangan lain yang menghambat efektivitas sistem ini adalah adanya pembaruan fitur secara berkala pada aplikasi CMSP. Transformasi digital yang dinamis ini menuntut para aparatur desa untuk terus menyesuaikan diri dan mempelajari ulang mekanisme sistem yang baru. Berdasarkan data yang dihimpun melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, proses adaptasi ini tidak bisa instan dan membutuhkan waktu yang cukup signifikan. Akibatnya, pemanfaatan aplikasi kerap kali mengalami perlambatan dan tidak dapat berjalan secara maksimal pada periode transisi tertentu, karena pengguna masih meraba-raba fungsi dan tampilan baru dari platform tersebut.

Fenomena ini sangat relevan dengan teori Richard M. Steers mengenai karakteristik teknologi organisasi sebagai salah satu faktor penentu efektivitas. Sebagai instrumen berbasis digital, CMSP secara konsisten mengalami pemutakhiran sistem guna meningkatkan keamanan atau fungsionalitasnya. Namun, perubahan teknologi yang cepat ini memaksa aparatur desa untuk keluar dari zona nyaman mereka dan memulai proses pembelajaran dari awal. Kendala dalam menjembatani kesenjangan kompetensi digital ini pada akhirnya berdampak langsung pada kelancaran administrasi, sehingga efektivitas penggunaan CMSP dalam mengelola dan merealisasikan transaksi keuangan desa belum mampu mencapai titik optimal.

c. Keterbatasan Kemampuan Teknologi Sebagian Aparatur

Faktor krusial lain yang memicu rendahnya efektivitas sistem ini adalah kesenjangan kompetensi digital di kalangan aparatur desa. Keterbatasan ini umumnya berakar dari latar belakang pendidikan formal yang belum selaras dengan tuntutan administrasi berbasis modern. Berdasarkan temuan nyata dari hasil wawancara dan pengamatan langsung, minimnya literasi teknologi ini memaksa para perangkat desa mengalokasikan waktu ekstra untuk mempelajari mekanisme kerja aplikasi CMSP. Ketiadaan modal keterampilan digital yang memadai membuat operasional aplikasi sering

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

kali tersendat, sehingga performa sistem tidak dapat langsung menyentuh level tertinggi dalam mendukung pelayanan publik.

Realitas tersebut memperkuat teori Richard M. Steers yang menempatkan karakteristik pekerja sebagai variabel penentu keberhasilan organisasi. Sebagai motor penggerak utama dalam tata kelola keuangan desa, kapasitas individu aparatur dalam mengoperasikan CMSP memegang kendali penuh atas sukses atau gagalnya sistem ini. Kendala teknis yang dihadapi di lapangan membuktikan bahwa aparatur desa masih membutuhkan bimbingan intensif serta pendampingan berkelanjutan agar terbiasa dengan ekosistem digital. Pada akhirnya, akselerasi efektivitas penggunaan CMSP sangat bergantung pada peningkatan kualitas SDM; semakin cakap aparatur desa menguasai teknologi, maka transparansi dan kecepatan transaksi keuangan desa akan meningkat secara linear.

d. Pelatihan dan Pendampingan Belum Dilakukan Secara Berkelanjutan

Faktor krusial lain yang mengganjal efektivitas sistem ini adalah belum adanya program pelatihan dan pendampingan yang dilakukan secara berkesinambungan. Meskipun aparatur desa memiliki keterbatasan literasi digital akibat latar belakang pendidikan yang kurang relevan, mereka belum mendapatkan pembinaan rutin pasca-implementasi awal aplikasi CMSP. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, ketiadaan bimbingan berkala ini memaksa para perangkat desa untuk mengeksplorasi dan memecahkan masalah pada fitur-fitur baru secara mandiri. Akibatnya, proses adaptasi teknologi berjalan lambat dan kurang terarah, yang kemudian berujung pada tidak optimalnya pemanfaatan aplikasi dalam mendukung tata kelola administrasi desa.

Fenomena ini sangat sejalan dengan konsep karakteristik manajemen dalam teori efektivitas organisasi yang dirumuskan oleh Richard M. Steers. Manajemen yang ideal seharusnya mampu mengintegrasikan pengelolaan sumber daya manusia melalui komunikasi yang intensif dan pembinaan yang terstruktur. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya celah dalam fungsi pengawasan dan pengembangan kapasitas kerja, di mana aparatur desa lebih sering mengandalkan diskusi informal antarsesama rekan sejawat saat menghadapi kendala sistem. Padahal, intervensi manajemen berupa edukasi berkelanjutan sangat mutakhir untuk mengikis kesenjangan kompetensi, sehingga operasional transaksi keuangan desa via CMSP dapat mencapai performa terbaiknya.

SIMPULAN

Mengacu pada seluruh dinamika yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tingkat Efektivitas Penggunaan Cash Management System Perbankan (CMSP) dalam Penatausahaan Keuangan di Kantor Desa Bangkiling, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong secara umum masih tergolong kurang efektif. Dari aspek pencapaian tujuan, dimensi kurun waktu dinilai cukup baik karena sistem digital ini telah terintegrasi sejak tahun 2024 guna menyokong pencairan dana desa. Begitu pula dengan ketepatan sasaran penggunanya yang sudah sangat fokus menyasar lini aparatur teknis-administratif, yaitu Bendahara Desa selaku maker, Sekretaris Desa sebagai checker, dan Kepala Desa selaku approver. Namun, indikator waktu penyelesaian tugas kerap terhambat akibat gangguan sistem dan jaringan yang tidak stabil, meskipun secara teoritis metode nontunai ini jauh lebih ringkas daripada transaksi konvensional. Di sisi lain, dimensi integrasi juga dinilai belum optimal; program sosialisasi dan bimbingan teknis di awal memang membantu, tetapi

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

kemunculan fitur-fitur baru yang tidak dibarengi edukasi lanjutan memaksa perangkat desa saling melempar tanya secara mandiri. Begitu pula koordinasi lintas instansi yang masih menuntut komunikasi intensif akibat problem teknis berkala. Sementara dari sudut pandang adaptasi, perangkat desa sebenarnya memiliki kemauan keras untuk menyesuaikan diri dan mengoperasikan platform digital ini dalam rutinitas harian, serta sepakat bahwa latar belakang pendidikan formal bukanlah ganjalan utama melainkan komitmen untuk belajar. Sayangnya, keberhasilan adaptasi internal ini terus-menerus dijegal oleh faktor penghambat eksternal yang masif, seperti buruknya sinyal internet, ketidaksinkronan data, dan minimnya pembinaan berkelanjutan. Padahal, jika hambatan infrastruktur tersebut dapat diatasi dengan penguatan kualitas jaringan, pembenahan sistem aplikasi, dan pelatihan berkala, CMSP memiliki potensi besar sebagai faktor pendukung utama yang menjamin tata kelola keuangan desa menjadi jauh lebih transparan, kilat, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Dalam Negeri. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kementerian Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pemerintah Desa Bangkiling. (2024). Profil Kantor Desa Bangkiling Tahun 2024. Pemerintah Desa Bangkiling.

Pemerintah Kecamatan Banua Lawas. (2025). Profil Kantor Kecamatan Banua Lawas Tahun 2025. Pemerintah Kecamatan Banua Lawas.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Amrizal, D., dkk. (2018). *Penanggulangan golput dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pilkada*. CV Aqli.

Anggraini, L. (2018). *Efektivitas rehabilitasi pecandu narkotika serta pengaruhnya terhadap tingkat kejahatan di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Mutiarin, D. (2021). *Manajemen birokrasi dan kebijakan (Cetakan ke-2*). CV Pustaka Belajar.

Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. CV Azka Pustaka.

Sawir, M. (2020). *Birokrasi pelayanan publik*. CV Budi Utama.

Siahan, & Pardede. (2022*). Transformasi pembangunan melalui pelayanan publik*. PT Pena Persada Kerta Utama.

Ulandari, B. D., & Martiningsih, R. S. P. (2025). *Penerapan Siskeudes berbasis Cash Management System dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa*. Jurnal Universitas Mataram.

Anindita, G., & Santoso, F. I. (2022*). Implementasi cash management system (CMS) dalam belanja daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman*. Jurnal Universitas Amikom Yogyakarta.

Ariyani, N., Arlan, A. S., & Handayani, R. (2024). *Efektivitas penggunaan aplikasi e-kinerja pegawai pada Kantor Camat Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Jurnal MSDM (Manajemen Sumber Daya Manusia), 1(3), 622–633.

Indrianasari, N. T. (2017). *Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Studi pada Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono).* ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak, 1(2), 29–46.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Riani, M. A. N., & Salim, H. (2025). *Efektivitas penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Pinang Habang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan, 2(1), 23–31.

Saputri, A., Deva, B., Bekti, & Indrawati, L. R. (2020). Penerapan cash management system dalam bidang program dan keuangan Balitbang Kota Magelang. Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM), 1(3), 194–204.

Tim Penyusun. (2022). *Pedoman penyusunan dan penulisan skripsi Program Studi S1 Administrasi Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.